

ABSTRAK

PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN DESENTRALISASI FISKAL (PERIODE 1991-2010)

Oleh

RESTI YULIASARI

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Momentum awal kebijakan otonomi daerah secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001 dan mempunyai arti penting bagi bangsa Indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal pada tingkat desentralisasi fiskal, tingkat kemampuan pembiayaan dan efisiensi penggunaan anggaran (kinerja pengeluaran).

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah di Provinsi Lampung adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan daerah yang meliputi rasio PAD terhadap TPD, BHPBP terhadap TPD dan SB terhadap TPD pada tingkat desentralisasi fiskal, rasio PAD terhadap TKD, PAD terhadap KR, jumlah PAD+BHPBP terhadap TKD pada tingkat kemampuan pembiayaan serta TSA terhadap TBD, TPL terhadap TBD efisiensi penggunaan anggaran.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang dilihat dari persentase PAD terhadap TPD, dari persentase BHPBP terhadap TPD dan dari persentase SB terhadap TPD pada masa sesudah desentralisasi fiskal, tingkat desentralisasinya menguat. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa sesudah otonomi daerah, pemerintah daerah sudah tidak bergantung pada pemerintah pusat. Hanya saja persentase SB terhadap TPD mengalami penurunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi persentase yang lainnya. Pada tingkat kemandirian pembiayaan

yang dilihat dari persentase PAD terhadap TKD, dari persentase PAD terhadap KR dan dari persentase PAD ditambah BHPBP terhadap TKD pada masa sesudah desentralisasi fiskal semakin tinggi rasionya, sehingga mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan Provinsi semakin rendah dan kiranya dapat terus digali sumber-sumber penerimaan dan BHPBP serta perlu ditingkatkan. Kinerja efisiensi anggaran yang dilihat dari persentase TSA terhadap TBD mengalami peningkatan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal tetapi pada persentase TPL terhadap TBD mengalami penurunan sesudah penerapan kebijakan desentralisasi fiskal sehingga pemerintah perlu kiranya lebih meningkatkan kemampuan perencanaannya dan pengawasannya terhadap anggaran keuangan daerah sehingga kebocoran anggaran dapat dikurangi.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Kebijakan Fiskal, Otonomi Daerah, Rasio Keuangan Daerah.